

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR
BALAI PEMASYARAKATAN (BAPAS) KELAS I MALANG
Jalan Barito No.1 Malang Telp. 0341-491131
Email : *malang_bapas@yahoo.co.id*

Nomor : W15.PAS.PAS.15.PR.04.04 - 197

Malang, 19 Januari 2023

Kepada Yth. :
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
Jawa Timur
Di -
SURABAYA

SURAT PENGANTAR

No.	Naskah Dinas Yang Dikirim	Banyaknya	Keterangan
1.	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022	1 (satu) berkas	Demikian untuk dipergunakan seperlunya.



K e p a l a,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

SUGANDI

NIP. 19650305 199003 1 001

Tembusan :
Arsip



BAPAS
MALANG

LKjIP Tahun 2022

Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah

user

Balai Pemasarakatan Kelas I
Malang

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas segala kemudahan dan petunjuk-Nya dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Balai Pemasarakatan Kelas I Malang.

Sebagai perwujudan penerapan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Balai Pemasarakatan Kelas I Malang menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Balai Pemasarakatan Kelas I Malang Tahun 2022 sebagai bentuk pertanggungjawaban, akuntabilitas dan transparansi atas pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja.

Laporan ini disajikan untuk memberikan gambaran akuntabilitas kinerja yang menyeluruh mengenai tiga aspek pembahasan yaitu capaian sasaran strategis, capaian indikator kinerja, dan akuntabilitas keuangan. Setiap aspek pembahasan diulas sesuai dengan kondisi yang sebenarnya agar dapat memberi gambaran capaian kinerja pada periode tertentu.

Disamping itu Laporan Kinerja dimaksudkan sebagai sarana pengendalian, penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (good governance and clean government) serta sebagai umpan balik dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan dan menjadi tolok ukur untuk peningkatan kinerja Balai Pemasarakatan Kelas I Malang pada masa mendatang.

Akhir kata, Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi terhadap penyusunan Laporan Kinerja ini. Semoga laporan ini bermanfaat bagi penanggung jawab dan pelaksana kegiatan di lingkungan Balai Pemasarakatan Kelas I Malang, serta pemangku kepentingan khususnya pihak-pihak yang membutuhkan.



Malang, 06 Januari 2023

Kepala



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Sugandi

NIP. 19631231 199003 1 008

DAFTAR ISI

	Hal.
KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
BAB I PENDAHULUAN	3
1.1 Latar Belakang	3
A. Umum	3
B. Visi dan Misi	3
C. Tugas dan Fungsi	3
D. Organisasi dan Personalia	4
E. Isu Strategis / Permasalahan Organisasi	8
1.2 Dasar Hukum	10
1.3 Maksud dan Tujuan	10
1.4 Pengertian dan Pengukuran Kinerja	11
1.5 Sistematika Penyajian	12
BAB II PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA	13
2.1 Perencanaan Kinerja	13
2.2 Perjanjian Kinerja	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	15
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	16
3.2 Realisasi Anggaran	27
3.3 Capaian Kinerja Anggaran	28
3.4 Capaian Kinerja Lainnya	29
BAB IV PENUTUP	31
4.1 Kesimpulan	31
4.2 Saran	31
LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

A. Umum

Bapas Kelas I Malang merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang menjalankan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan dan pendampingan serta melakukan sidang TPP (Tim Pengamat Masyarakat) di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI di wilayah propinsi Jawa Timur. Berbagai program dan kegiatan telah dilaksanakan untuk menjawab isu-isu strategis yang berkembang pada Balai Masyarakat Kelas I Malang dalam kurun waktu tahun 2022. Pelaksanaan program dan kegiatan pada akhir periode tahun anggaran harus dievaluasi untuk mengetahui seberapa besar manfaat dan dampak program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas alokasi anggaran yang telah digunakan kepada publik dan pemangku kepentingan lainnya dalam bentuk Laporan Kinerja.

Mengacu pada Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014, dan berdasarkan latar belakang tersebut di atas, Balai Masyarakat Kelas I Malang menyampaikan kinerja atas pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan selama Tahun 2021 yang dituangkan dalam suatu bentuk dokumen Laporan Kinerja Balai Masyarakat Kelas I Malang Tahun Anggaran 2022.

B. Visi dan Misi

Sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang menjalankan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM RI di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI wilayah propinsi Jawa Timur, Balai Masyarakat Kelas I Malang menjalankan visi dan misi Kementerian Hukum dan HAM RI, sebagai berikut :

- Visi : Memulihkan kesatuan hidup, kehidupan Klien Masyarakat sebagai individu, anggota masyarakat dan makhluk Tuhan
- Misi : Melaksanakan pembinaan, bimbingan dan pendampingan Klien Masyarakat untuk menjadi manusia mandiri
- Motto : Kami Selalu Siap Melayani, Membimbing dan Mendampingi

C. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, Bapas Kelas I Malang merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI di wilayah propinsi Jawa Timur melaksanakan tugas dan fungsi sebagai berikut:

- Tugas : “Memberikan bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”
- Fungsi : 1. Melaksanakan penelitian kemasyarakatan untuk usulan PB, CB, CMB dan proses peradilan anak serta pelaksanaan diversi;
 2. Melakukan registrasi klien masyarakat;
 3. Melakukan bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak;
 4. Mengikuti sidang peradilan di Pengadilan Negeri dan sidang Tim Pengamat Masyarakat di LP / Rutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 5. Memberi bantuan bimbingan kepada bekas narapidana, anak Negara dan lien masyarakat yang memerlukan;
 6. Melakukan urusan tata usaha balai .

D. Organisasi dan Personalia

Susunan organisasi sesuai dengan Peraturan Menteri Kehakiman dan HAM RI Nomor M-15.PR.07.03 TAHUN 2003 tentang Peningkatan Kelas Balai Masyarakat Malang dan Balai Masyarakat Malang dari Kelas II menjadi Kelas I, Balai Masyarakat Kelas I Malang terdiri atas 3 Divisi, dengan uraian tugas dan fungsi sebagai berikut:

STRUKTUR ORGANISASI	FUNGSI
1. Subbag Tata Usaha	1. Menyusun rencana kerja Sub bagian Tata Usaha; 2. Mengkoordinasikan pendistribusian, pengelolaan arus surat masuk dengan sistem kartu kendali untuk memperlancar penerimaan informasi; 3. Mengkoordinasikan penyetoran surat-surat keluar dilingkungan Bapas Kelas I Malang 4. Mengkoordinasikan pengiriman surat keluar untuk memperlancar penyampaian informasi; 5. Meneliti konsep pertanggungjawaban penggunaan pengiriman surat dinas, telex dan telegram sesuai dengan kwitansi/resi bukti pengiriman; 6. Mengklasifikasi arsip dan dokumentasi dilingkungan Bapas Kelas I Malang 7. Menyelenggarakan urusan kearsipan dan dokumentasi dengan mengatur kegiatan penyediaan, pelayanan peminjaman, penyimpanan dan pemeliharaan arsip surat-surat dan dokumentasi kantor; 8. Meneliti dan mengoreksi konsep surat yang berkaitan dengan tugas kerumahtanggaan yang diajukan oleh Kepala Urusan Umum; 9. Menyelenggarakan pemeliharaan kendaraan dinas agar selalu dalam keadaan siap digunakan;

	<ol style="list-style-type: none"> 10. Mengatur penggunaan kendaraan dan angkutan dinas untuk menunjang kelancaran tugas; 11. Menyelenggarakan administrasi pemeliharaan kendaraan dinas sebagai bahan pertanggung jawab penggunaan kendaraan dinas; 12. Menyelenggarakan pemeliharaan alat perlengkapan kantor, gedung kantor dan rumah dinas sesuai dengan rencana dan anggaran yang telah ditetapkan; 13. Menyelenggarakan pemeliharaan pemakaian telepon, listrik, air dan kebersihan ruangan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya; 14. Meneliti berkas tagihan pemeliharaan alat perlengkapan kantor, gedung kantor, rumah dinas dan biaya langganan listrik dan telepon untuk mendapatkan penyelesaian pembayaran; 15. Menyelesaikan pelaksanaan penghapusan atau penjualan alat perlengkapan kantor dan kendaraan dinas sesuai dengan peraturan yang berlaku; 16. Mengkoordinasikan pembuatan Daftar Gaji/lembur dan Rapel pegawai dilingkungan Bapas Kelas I sebagai bahan untuk melakukan pembayaran gaji/lembur dan rapel; 17. Mempersiapkan dan menyelenggarakan pengurusan perjalanan dinas dalam rangka kelancaran tugas; 18. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengamanan dilingkungan Bapas Kelas I Malang 19. Mengkoordinasikan penyusunan Pra Daftar Usulan Kegiatan dan Pra Daftar Usulan Proyek sebagai bahan penyediaan dana kegiatan dan dana pembangunan; 20. Menyusun konsep surat tanggapan yang berkaitan dengan anggaran rutin dan pembangunan dalam rangka meminta data/penjelasan lebih lanjut; 21. Menganalisa data kepegawaian dan usul-usul formasi pegawai Bapas Kelas I sebagai bahan usulan ke Kepala Kantor Wilayah; 22. Menganalisa data kepegawaian dan mengusulkan pegawai Bapas Kelas I untuk mengikuti pendidikan dan Latihan Pegawai;
--	--

	<ol style="list-style-type: none"> 23. Menyusun daftar nama-nama calon pegawai yang telah memenuhi persyaratan untuk mengikuti Pra Jabatan; 24. Menyiapkan usul pengangkatan calon Pegawai berdasarkan hasil seleksi ujian penerimaan pegawai; 25. Menganalisa data kepegawaian sebagai bahan usul ke Kepala Kantor Wilayah untuk mengikuti ujian Tk. I dan Tk. II; 26. Mengusulkan usul pemberian penghargaan Tanda Kehormatan dan bentuk-bentuk penghargaan lainnya; 27. Mengajukan permintaan atau usul pemberian Kartu Pegawai bagi pegawai Calon Pegawai yang telah diangkat Pegawai Negeri Sipil kepada Kepala Kantor Wilayah; 28. Menganalisa data kepegawaian untuk menyiapkan DUK pegawai Bapas Kelas I Malang 29. Menyiapkan surat permintaan pengujian kesehatan bagi calon Pegawai Negeri Sipil kepada Dokter Penguji Kesehatan atau Tim Penguji Kesehatan Calon Pegawai yang akan diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil; 30. Menyiapkan surat usul ke kepala Kantor wilayah tentang pengangkatan dan mutasi lain pegawai Bapas Kelas I Malang 31. Menyiapkan penyelenggaraan sumpah Pegawai Negeri dan sumpah serta Pelantikan Jabatan; 32. Menugaskan kaur kepegawaian untuk menyusun Daftar Nominatif rencana kenaikan pangkat pegawai dilingkungan Bapas Kelas I Malang 33. Melakukan pengusulan pengangkatan dalam jabatan struktural; 34. Melaksanakan pengusulan pemindahan pegawai; 35. Melaksanakan pengusulan pemberhentian dan pemensiunan; 36. Melakukan pembinaan pegawai dalam lingkungan Sub Bagian Tata Usaha; 37. Mengkoordinasikan penyiapan bahan tanggapan RASTAF A, sebagai bahan petunjuk penyelesaian masalah; 38. Melakukan/mengesahkan penilaian pelaksanaan pekerjaan pejabat bawahan;
--	--

	<p>39. Melakukan Pengawasan Melekat (WASKAT) dalam lingkungan Sub Bagian Tata Usaha;</p> <p>40. Melaksanakan tindak lanjut petunjuk yang tertuang dalam LHP;</p> <p>41. Menyiapkan dan menyusun laporan Sub Bagian Tata Usaha;</p>
--	--

STRUKTUR ORGANISASI	FUNGSI
2. Seksi Bimbingan Klien Dewasa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun rencana kerja seksi bimbingan Klien Dewasa; 2. Mengkoordinasikan penyelenggaraan registrasi klien dewasa di luar lembaga Pemasarakatan; 3. Mengkoordinasikan bimbingan kemasyarakatan terhadap klien dewasa diluar Lembaga pemsarakatan ; 4. Mengkoordinasikan pelaksanaan Penelitian Kemasyarakatan sesuai permintaan yang diajukan oleh Instansi terkait; 5. Mengkoordinasikan bimbingan kerja terhadap Klien Dewasa di luar Lembaga Pemasarakatan; 6. Memberikan penilaian pelaksanaan pekerjaan bawahan; 7. Melakukan bimbingan pegawai bawahan; 8. Melaksanakan ketatausahaan dalam pembinaan klien Dewasa; 9. Melakukan Pengawasan Melekat ; 10. Menyusun laporan Seksi Bimbingan Klien Dewasa.

STRUKTUR ORGANISASI	FUNGSI
2. Seksi Bimbingan Klien Anak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun rencana kerja Seksi Bimbingan Klien Anak; 2. Mengkoordinasikan penyelenggaraan bimbingan kemasyarakatan terhadap klien anak diluar Lembaga Pemasarakatan; 3. Mengkoordinasikan pelaksanaan penelitian kemasyarakatan sesuai permintaan yang diajukan oleh instansi terkait; 4. Mengkoordinasikan bimbingan kerja terhadap klien anak diluar lembaga pemsarakatan;

	<ol style="list-style-type: none"> 5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan registrasi terhadap klien Anak diluar Lembaga Masyarakat; 6. Memberikan penilaian pelaksanaan pekerjaan bawahan; 7. Memberikan bimbingan kerja kepada pegawai bawahan; 8. Mengkoordinasikan pelaksanaan ketatausahaan; 9. Melaksanakan Pengawasan Melekat (WASKAT); 10. Mengkoordinasikan penyusunan laporan.
--	---

Struktur organisasi Kantor, sesuai dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dapat dilihat seperti gambar dibawah ini:



E. Isu Strategis / Permasalahan Organisasi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Balai Masyarakat Kelas I Malang selama periode tahun 2022, terdapat beberapa isu strategis/permasalahan organisasi yang dialami antara lain:

NO.	ISU STRATEGIS / KENDALA YANG DIHADAPI	SOLUSI / TINDAK LANJUT
A. BAGIAN TATA USAHA		
1.	Terbatasnya ruangan mediasi ABH dan ruangan bimbingan keterampilan.	Kegiatan pembimbingan keterampilan saat ini dilakukan di garasi mobil dinas Ka. Bapas

NO.	ISU STRATEGIS / KENDALA YANG DIHADAPI	SOLUSI / TINDAK LANJUT
2.	Terbatasnya sarana transportasi kendaraan roda 4 (empat), saat ini hanya terdapat 1 unit, kurang sebanding dengan luas wilayah cakupan pelayanan Bapas, terbatasnya sarana Komputer	Home Visite untuk wilayah yang jarak tempuhnya jauh menggunakan kendaraan sepeda motor kantor, angkutan umum dan ojek. Namun pelayanan ditengah pandemik corona menggunakan video call sebagai langkah memutus rantai Covid19.
3.	Kurangnya jumlah pegawai Bapas, dengan spesifikasi kebutuhan : - Operator komputer - Psikolog - Pembimbing Agama - Tenaga Daktiliskopi	Sistem Rangkap peran dan Rangkap Tugas

NO.	ISU STRATEGIS / KENDALA YANG DIHADAPI	SOLUSI / TINDAK LANJUT
B. SEKSI BIMBINGAN KLIEN DEWASA		
1.	Kurangnya sarana untuk bimbingan kerja Klien	Kekurangan tersebut selama ini dicover oleh pihak ketiga (balai latihan kerja)
2.	Tidak adanya tenaga pelatih keterampilan bagi klien	Bapas selama ini bekerjasama dengan pihak ketiga
3.	Jumlah Litmas klien dewasa pada tahun 2022 sebesar 2924 klien	Tiap PK Bapas Malang menangani 97 klien dalam setahun

NO.	ISU STRATEGIS / KENDALA YANG DIHADAPI	SOLUSI / TINDAK LANJUT
B. SEKSI BIMBINGAN KLIEN ANAK		
1.	Kurangnya sarana untuk bimbingan kerja Klien	Kekurangan tersebut selama ini dicover oleh pihak ketiga (balai latihan kerja)

NO.	ISU STRATEGIS / KENDALA YANG DIHADAPI	SOLUSI / TINDAK LANJUT
2.	Tidak adanya tenaga pelatih keterampilan bagi klien	Bapas selama ini bekerjasama dengan pihak ketiga
3.	Jumlah klien anak pada tahun 2022 sebesar 149 Litmas Klien Anak	Tiap PK Bapas Malang menangani 5 kegiatan litmas anak selama periode tahun 2022

1.2 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
7. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM;
8. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-04.PR.03.01 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

1.3 Maksud dan Tujuan

Dalam rangka implementasi atas Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014, Balai Pemasarakatan Kelas I Malang menyusun Laporan Kinerja TA. 2022 ini dengan maksud untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (*good governance and clean government*). Disamping itu Laporan Kinerja ini disusun dengan tujuan sebagai berikut:

1. Memberikan informasi target kinerja dan capaian kinerja yang terukur pada Balai Kelas I Malang.
2. Sebagai sarana pengendalian dan evaluasi / penilaian kinerja pada Balai Pemasarakatan Kelas I Malang.

3. Sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan periode berikutnya serta dasar untuk perbaikan dan peningkatan kinerja Balai Pemasarakatan Kelas I Malang secara berkelanjutan.

1.4 Pengertian dan Pengukuran Kinerja

Secara umum istilah kinerja digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan individu maupun kelompok individu/organisasi. Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi. Kinerja bisa diketahui hanya jika individu atau kelompok individu tersebut mempunyai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan. Kriteria keberhasilan ini berupa tujuan-tujuan atau target-target tertentu yang hendak dicapai. Selanjutnya capaian kinerja tersebut perlu diukur dan dievaluasi untuk mengetahui sejauh mana sasaran/target organisasi yang dapat dicapai organisasi dalam kurun waktu tertentu.

Pengukuran kinerja merupakan proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, termasuk informasi atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai tujuan atau target/sasaran yang telah ditentukan. Sehingga dapat dikatakan bahwa kinerja dapat diukur melalui perbandingan antara realisasi/hasil pekerjaan dengan target/sasaran pekerjaan yang telah ditentukan sebagai tujuan organisasi.

Melaksanakan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014, Balai Pemasarakatan Kelas I Malang sebagai instansi pemerintah berkewajiban menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatannya atas alokasi anggaran yang telah digunakan selama kurun waktu 1 tahun anggaran dalam bentuk laporan kinerja. Laporan kinerja ini memuat target/sasaran kinerja yang telah ditentukan oleh masing-masing Unit Esselon I Kementerian Hukum dan HAM RI yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM RI. Target/sasaran kinerja ini disusun dalam suatu Perjanjian Kinerja yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah dan disampaikan kepada pimpinan Unit Esselon I Kementerian Hukum dan HAM RI. Untuk menguraikan Perjanjian Kinerja tersebut disusunlah Perjanjian Kinerja Kepala Bagian/Bidang dan Perjanjian Kinerja Kepala Subbagian/Subbidang yang berisi target/sasaran kinerja program dan kegiatan dalam kurun waktu 1 tahun anggaran dan disampaikan kepada Kepala Divisi.

Dalam laporan kinerja juga menjelaskan realisasi capaian kinerja sebagai hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan dalam kurun waktu 1 tahun anggaran. Dan selanjutnya pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi capaian kinerja dengan target/sasaran kinerja dalam satuan persentase. Rumus pengukuran kinerja tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi Kinerja}}{\text{Target Kinerja}} \times 100\%$$

Laporan kinerja juga menyajikan gambaran alokasi anggaran yang digunakan dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam kurun waktu 1 tahun anggaran, dimana capaian realisasi anggaran diukur dalam satuan persentase dengan rumusan sebagai berikut:

$$\text{Capaian Realisasi Anggaran} = \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Pagu Anggaran}} \times 100\%$$

Melalui pengukuran ini, maka dapat diketahui tingkat keberhasilan Balai Pemasarakatan Kelas I Malang dalam mencapai target/sasaran kerjanya. Selanjutnya dilakukan suatu analisa terhadap faktor pendukung dan penghambat dalam upaya mencapai target/sasaran kinerja tersebut. Perlu ditemukan solusi terhadap faktor penghambat, sehingga laporan kinerja yang disusun dapat digunakan sebagai perencanaan dan pelaksanaan kegiatan periode berikutnya serta dasar untuk perbaikan dan peningkatan kinerja Balai Pemasarakatan Kelas I Malang secara berkelanjutan.

1.5 Sistematika Penyajian

Dalam penyusunan Laporan Kinerja Balai Pemasarakatan Kelas I Malang 2022 menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Menjelaskan secara ringkas profil Balai Pemasarakatan Kelas I Malang, latar belakang, maksud dan tujuan disusunnya laporan kinerja, serta menjelaskan pengertian dan rumusan pengukuran kinerja yang digunakan. Sekaligus juga mengungkapkan isu strategis yang dihadapi Balai Pemasarakatan Kelas I Malang.

BAB II Perencanaan Kinerja dan Perjanjian Kinerja

Menjelaskan mengenai perencanaan kinerja dan perjanjian kinerja tahun 2022 yang disusun, termasuk pagu anggaran dan rencana realisasi anggarannya.

BAB III Akuntabilitas Kinerja

Menjelaskan tentang capaian kinerja dan realisasi anggaran atas program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2022. Selanjutnya menjelaskan analisis atas capaian kinerja, termasuk faktor pendukung dan penghambat dalam pencapaian kinerja tersebut.

BAB IV

Menjelaskan simpulan umum atas capaian kinerja tahun 2022 serta saran rekomendasi yang diperlukan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan kinerja dimasa mendatang.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. PERENCANAAN KINERJA

Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM pasal 57 ayat 3 mengamanatkan bahwa Kepala Unit Pelaksana Teknis berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal atau Kepala Badan melalui Kepala Divisi terkait. Hal ini menandakan berlakunya restrukturisasi program pada Kementerian Hukum dan HAM RI melalui sistem inline. Dengan demikian seluruh kegiatan yang dilaksanakan Satker harus mendukung pencapaian sasaran kinerja unit eselon I (IKU).

Berdasarkan DIPA Petikan Bapas Malang **TA. 2022 No. SP DIPA-013.05.2.405327/2022**, sasaran program/IKU Direktorat Pemasarakatan diturunkan menjadi sasaran kegiatan / Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang digunakan sebagai acuan pengukuran dan pengendalian pelaksanaan kinerja Balai Pemasarakatan Kelas I Malang, sebagai berikut:

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1	Memastikan penegakkan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekono nasional	Presentase klien pemsarakatan yang produktif mandiri dan berdayaguna	45%
2	Memastikan pelayanan public di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan public bidang hukum	77,5%

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET
1	Memastikan penegakkan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekono nasional	Presentase klien pemsarakatan yang produktif mandiri dan berdayaguna	45%

ANGGARAN	
Program Pelayanan dan Penegakkan Hukum	
Penyelenggaraan Pemsarakatan di Wilayah	Rp.1.178.431.000,-
Program Dukungan Manajemen	
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemsarakatan	Rp.4.557.118.000,-

2.2. PERJANJIAN KINERJA

Sesuai Perencanaan Kinerja Bapas Malang dan DIPA TA. 2022 tersebut diatas, disusunlah Perjanjian Kinerja Bapas Malang Tahun 2022, sebagai berikut:

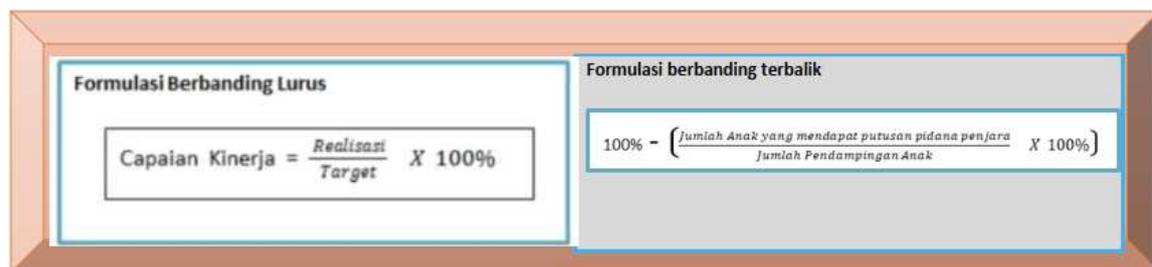
NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1	Meningkatnya pelayanan pembimbingan klien masyarakat dan pemenuhan hak pendidikan klien anak pada luar Lembaga di wilayah sesuai standar	1. Presentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan diluar lembaga	50%
		2. Presentase menurunnya Anak yang mendapatkan putusan sidang penjara	60%
		3. Presentase klien Anak yang terpenuhi hak pendidikannya	30%
2	Meningkatnya dukungan layanan manajemen Satker	1. Tersusunnya dokumen rencana kerja anggaran UPT Masyarakat dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan
		2. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan kerumah tanggaan	1 Layanan
		3. Terpenuhnya data dan peningkatan kompetensi pegawai masyarakat	1 Layanan
		4. Tersusunnya dokumen pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan
		5. Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan
		6. Jumlah Kendaraan Bermotor	21 Unit
		7. Jumlah perangkat pengolah data dan komunikasi	31 Unit
		8. Jumlah peralatan dan fasilitas perkantoran	55 Unit
		9. Jumlah Gedung atau bangunan	1 Unit

Untuk mencapai sasaran kegiatan Pembinaan dan Penyelenggaraan Masyarakat tahun 2022, Balai Masyarakat Kelas I Malang Malang memiliki alokasi anggaran sebesar Rp. 5.735.549.000,-

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah suatu perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program atau kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi instansi secara terukur sejalan dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Dalam mengukur keberhasilan/kegagalan atas pelaksanaan suatu program atau kegiatan/program perlu dilakukan pengukuran kinerja, sehingga dapat menunjukkan impact/outcome dari setiap indikator kinerja Bapas Malang beserta analisisnya.

Pengukuran capaian kinerja Bapas Malang dilakukan per indikator kinerja, dengan membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Beberapa pengukuran realisasi kinerja memiliki formulasi hubungan berbanding terbalik yang seharusnya dihitung kembali formulasi capaian kinerja (keberhasilan/kegagalan) sesungguhnya. Pengukuran capaian kinerja dapat digambarkan dengan formulasi sebagai berikut ;



Dalam mencapai capaian sasaran kinerja, Bapas Malang merumuskan indeks capaian berdasarkan range nilai. Hal ini dilakukan untuk mengelompokkan capaian dari setiap indikator kinerja sehingga memudahkan dalam melakukan monitor, mengelompokkan dan menganalisa isu strategis/kendala yang terjadi di lingkungan kerja. Berikut pengelompokan range nilai capaian yang digunakan Bapas Malang ;

Range Nilai Capaian	Keterangan
>100	Sangat Baik
85 s.d 100	Baik Sekali
55 s.d <85	Baik
55 s.d <70	Cukup
<55	Kurang

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Selama periode Semester II tahun anggaran 2022 Balai Pemasarakatan Kelas I Malang telah melaksanakan berbagai kegiatan sesuai dengan **DIPA No. SP DIPA-013.05.2.405327/2022** dalam rangka memenuhi sasaran kinerja yang telah ditetapkan dalam rencana kinerja dan perjanjian kinerja tahun 2022, berikut kegiatan yang telah dilaksanakan:

❖ **Meningkatnya pelayanan pembimbingan klien pemsarakatan dan pemenuhan hak pendidikan klien anak pada luar Lembaga**

1. Persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar Lembaga

Pembinaan Kemandirian merupakan pembinaan untuk meningkatkan bekal keterampilan kerja produktif guna mendukung proses adaptasi Klien Pemasarakatan di lingkungan masyarakat. Klien usia produktif disini adalah klien yang berusia antara 15 tahun sampai 64 tahun. Adapun formulasi perhitungannya adalah Jumlah Klien Usia Produktif yang Memperoleh atau Melanjutkan Pekerjaan di Luar Lembaga dibagi Jumlah Klien Usia Produktif dikali 100%, sebagai berikut;

Jumlah Klien Pemasarakatan Produktif, Mandiri dan Berdaya Guna	Jumlah Klien Usia Produktif	Jumlah Total Klien
1966	2897	2924

Total Klien Usia Produktif

Dengan formulasi perhitungan sebagai berikut ;

$$\left(\frac{\text{jumlah klien usia produktif yang mendapatkan pekerjaan}}{\text{jumlah klien usia produktif}} \times 100\% \right)$$

$$\left(\frac{1966}{2897} \times 100\% \right) = 67,86 \%$$

Prosentase meningkatnya klien yang mendapatkan pekerjaan menunjukkan angka 67,86% dari target 50%

2. Persentase menurunnya Anak yang mendapatkan putusan pidana penjara

Pendampingan Anak Bekonflik Hukum (ABH) dilakukan demi kepentingan terbaik bagi anak. Pendampingan dilakukan secara baik tanpa adanya intimidasi dan diskriminasi. Pendampingan ABH harus dilakukan secara profesional dan sesuai peraturan yang ada. Pendampingan dapat dilakukan melalui rehabilitasi sosial. Hal ini agar anak nantinya mampu berinteraksi kembali dalam kehidupan masyarakat setelah mengalami suatu masalah. Berkaitan dengan hal tersebut maka di Indonesia diperlukan perlindungan, pengawasan, dan pendampingan anak baik di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Adapun hasil pendampingan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Bapas Malang meliputi ; diversifikasi, putusan anak kembali ke orang tua, putusan diserahkan ke panti sosial, mediasi dan pidana penjara. Adapun data Hasil pendampingan ABH selama tahun 2022 adalah sebagai berikut;

HASIL PENDAMPINGAN ABH	
LITMAS KEPOLISIAN	124 LITMAS
LITMAS BAPAS LAIN	06 LITMAS
LITMAS ASS/CB/PB	19 LITMAS
LITMAS PE,B. AWAL	0 LITMAS
TOTAL	149

Total ABH berdasarkan permintaan Litmas

HASIL PENDAMPINGAN ABH	
DIVERSI	104
AKOT	3
PIDANA DALAM LEMBAGA	2
PIDANA PENJARA	40
TOTAL	149

Dengan formulasi perhitungan sebagai berikut ;

$$100\% \cdot \left(\frac{\text{jumlah anak yang mendapat putusan penjara}}{\text{jumlah pendampingan anak}} \times 100\% \right)$$

$$100\% \cdot \left(\frac{40}{149} \times 100\% \right) = 73,15 \%$$

Prosentase menurunnya anak yang mendapatkan putusan pidana menunjukkan angka 73,15% dari target 60%

3. Persentase klien Anak yang terpenuhi hak pendidikannya

Adaptasi Klien Anak Balai Pemasarakatan Kelas I Malang dalam kehidupan sosial masyarakat meliputi mengendalikan diri dan melibatkan diri dalam kegiatan sosial. Sedangkan problematika yang dihadapi Klien Anak Balai Pemasarakatan Kelas I Malang selama proses beradaptasi dalam kehidupan sosial masyarakat adalah menjadi korban tuduhan dan ditolak secara sosial. Untuk itulah diperlukan revitalisasi Pemasarakatan dalam hal ini adalah Klien Anak dipenuhi hak pendidikannya guna masa depannya kelak agar menjadi pribadi lebih baik lagi.

Berikut perhitungan persentase Klien Anak Yang Terpenuhi Hak Pendidikannya di Bapas Malang selama tahun 2022 :

TINGKAT PENDIDIKAN	
SMU / PAKET C	38
SMP / PAKET B	59
SD / PAKET A	31
TOTAL	128

Dengan formulasi perhitungan sebagai berikut ;

$$\left(\frac{\text{jumlah anak yang melanjutkan pendidikan}}{\text{jumlah total ABH}} \times 100\% \right)$$

$$\left(\frac{128}{149} \times 100\% \right) = 85,9\%$$

Prosentase meningkatnya anak yang melanjutkan pendidikan menunjukkan angka 85,9% dari target 30%

❖ **Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker**

1. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu

Kegiatan Penyusunan RKA-KL dalam rangka Pelaksanakan program dan Kegiatan terkait program dan anggaran agar dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan

2. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tangga

Kegiatan telah dilaksanakan oleh Bagian Umum Bapas Surabaya. Kegiatan tersebut meliputi rangkaian kegiatan antara lain pengelolaan urusan perencanaan, pengadaan dan analisis kebutuhan barang milik negara, pengelolaan urusan penatausahaan dan penghapusan barang milik negara, pengelolaan urusan perawatan barang milik negara dan rumah tangga

3. Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasarakatan

Pembinaan Fisik Mental dan Disiplin (FMD) Peningkatan kapasitas petugas Pemasarakatan dengan kegiatan yang menunjang Tugas dan Fungsi (TUSI) secara langsung telah dilaksanakan dengan baik

4. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu

Kegiatan Pelaksanakan Pengelolaan Keuangan telah dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku dalam hal pelaporan dan pembukuan oleh bendahara. Selain itu juga melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan instansi terkait Seperti KPPN dan Ditjen Perbendaharaan

5. Jumlah Layanan Perkantoran

Untuk menunjang tugas pokok dan fungsi Pemasarakatan dibutuhkan output dalam rangka pelaksanaan operasional perkantoran guna mendukung pencapaian kinerja, yang terdiri atas komponen sebagai berikut :

- Gaji dan Tunjangan
- Operasional dan Pemeliharaan Kantor

Kegiatan sudah dilaksanakan dengan baik selama tahun anggaran 2022 dengan Nilai SMART 91,93 / Skala 100

6. Jumlah kendaraan bermotor

Jumlah target unit pengadaan kendaraan bermotor dalam 1 tahun adalah 0 (NOL)

7. Jumlah perangkat pengolah data dan komunikasi

Jumlah target unit perawatan perangkat pengolah data dan komunikasi dalam 1 tahun adalah 31 unit.

8. Jumlah peralatan dan fasilitas perkantoran

Jumlah target unit perawatan peralatan dan fasilitas perkantoran dalam 1 tahun adalah 55 unit.

9. Jumlah gedung/ bangunan

Jumlah target luasan M2 pembangunan/ renov gedung/bangunan dalam 1 tahun adalah 0 (NOL).

Dengan menggunakan formulasi perhitungan diatas, maka didapat hasil sebagai berikut;

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Capaian	Capaian Kinerja	% Rata-rata capaian kinerja	Keterangan
1	Meningkatnya pada luar lembaga di wilayah sesuai standar pelayanan bimbingan klien pemsarakatan dan pemenuhan hak pendidikan klien anak	Presentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan diluar lembaga	50%	67,86%	135%	135%	Sangat Baik
		Presentase menurunnya Anak yang mendapatkan putusan sidang penjara	60%	73,15%	121%	121%	Sangat Baik
		Persentase klien Anak yang terpenuhi hak pendidikannya	30%	85,90%	283%	283%	Sangat Baik
2	Meningkatnya dukungan layanan manajemen Satker	Tersusunnya dokumen rencana kerja anggaran UPT Pemsarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	100%	100%	Sangat Baik
		Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan kerumah tanggaan	1 Layanan	1 Layanan	100%	100%	Sangat Baik
		Terpenuhnya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemsarakatan	1 Layanan	1 Layanan	100%	100%	Sangat Baik
		Tersusunnya dokumen pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	100%	100%	Sangat Baik
		Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	100%	100%	Sangat Baik
		Jumlah Kendaraan Bermotor	21 Unit	21 Unit	100%	100%	Sangat Baik
		Jumlah perangkat pengolah data dan komunikasi	31 Unit	31 Unit	100%	100%	Sangat Baik
		Jumlah peralatan dan fasilitas perkantoran	55 Unit	55 Unit	100%	100%	Sangat Baik
		Jumlah Gedung atau bangunan	1 Unit	1 Unit	100%	100%	Sangat Baik

Dari tabel diatas diperoleh hasil analisa sebagai berikut:

❖ **Meningkatnya Pelayanan Pembimbingan Klien Pemasarakatan Dan Pemenuhan Hak Pendidikan Klien Anak Pada Luar Lembaga**

1. Persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar Lembaga

Kualitas pelayanan pembimbingan klien Pemasarakatan dan pemenuhan hak pendidikan klien anak pada luar lembaga diukur melalui indikator Persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga. Sebagai tujuan akhir pembinaan untuk pembimbingan klien dewasa, data menunjukkan bahwa target yang ditetapkan dalam penjanjian kinerja di awal tahun 2022 telah tercapai dengan capaian kinerja mencapai 135%.



Data ini menunjukkan efektifnya kegiatan pembimbingan keterampilan/kemandirian dan kepribadian dalam membentuk klien Bapas Surabaya menjadi manusia yang taat hukum dan berdaya guna serta hidup mandiri. Klien baru di Bapas Surabaya, yang mulai aktif dilaksanakan di trimester akhir tahun 2022, terbukti mampu mengantarkan klien menjadi produktif dan berdaya guna. Griya Abipraya Bapas Malang yang berlokasi di Pujon Kab. Malang ini adalah tempat atau wadah untuk menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan masyarakat (Pokmas Lipas) bagi klien pemasarakatan melalui kegiatan kepribadian, kemandirian, dan kemasarakatan dalam rangka perbaikan diri dan peningkatan kualitas pelanggar hukum (tersangka/tahanan dan warga binaan pemasarakatan) agar dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan diterima kembali oleh lingkungan masyarakat.

Melalui Griya Abhipraya, dapat dilihat juga keberhasilan Pemberdayaan Masyarakat untuk Pelaksanaan Keadilan Restoratif juga dipengaruhi oleh Kelompok Masyarakat Peduli Pemasarakatan (POKMAS LIPAS) yang melaksanakan program pemberdayaan Klien di lingkungan masyarakat

Kerjasama yang dijalin Bapas Kelas I Malang dengan 20 Kelompok Masyarakat Peduli Pemasarakatan (Pokmas Lipas) yang aktif melaksanakan program pemberdayaan Klien Bapas Malang di lingkungan masyarakat di Tahun 2022, yaitu :

Kerjasama Pemasarakatan			
No	Nama Lembaga	No	Nama Lembaga
1	LPKS Robbani	7	BRSAMPK "Antasena"
2	Komunitas Cinta Anak (KCA) Malang	8	Ponpes Manbaul Ulum Kota Probolinggo
3	Widuri Catering & Wedding Organizer	9	Pesantren Digital IQRASATU
4	IPSPI Jawa Timur	10	CV Riang Java Food
5	LKSA Darul Aitam	11	Fakultas Hukum Univ. Brawijaya
6	Fisip Univ. Brawijaya		

2. Persentase menurunnya Anak yang mendapatkan putusan pidana penjara

Keberhasilan capaian target Bapas Surabaya juga dipengaruhi oleh keadilan restorative (restorative justice). Pemberlakuan Keadilan restoratif (restorative justice) yang merupakan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang dalam mekanisme tata cara peradilan pidana berfokus pada pemidanaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama menandatangani kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat.

Bersinergi dengan aparat penegak hukum dari enam kabupaten/kota, yakni; Malang, Pasuruan, Batu, Probolinggo, dan Lumajang. Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Malang terbukti mampu melakukan tugas pembimbingan pra ajudikasi hingga post ajudikasi dengan baik.

Koordinasi dan kolaborasi yang baik dengan aparat penegak hukum lainnya, mengantarkan Bapas Malang meraih capaian kinerja 121% atau sangat baik pada tahun 2022 ini.

3. Persentase klien Anak yang terpenuhi hak pendidikannya

Sebagai katalisator dalam proses pembimbingan dan pendampingan Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH), Bapas Malang Lebih daripada itu, pendidikan bagi anak adalah kewajiban bagi negara untuk memenuhinya bagi anak-anak.

Terkhusus untuk ABH, Bapas Malang tidak ingin membebani pada satu pihak saja untuk memenuhi hak pendidikan. Bapas Malang mengakui, ruang gerak untuk berkoordinasi dengan pihak terkait sangatlah luas agar pendidikan ABH atau mantan ABH tetap berlanjut. Namun, luasnya wilayah kerja Bapas menjadi tantangan yang harus ditempuh. Keterbukaan Bapas Malang untuk bekerjasama dengan pihak manapun untuk memberikan atensi khusus pada ABH sebagaimana amanat UU Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan kelembagaan Bapas membuat capaian untuk indikator kinerja kegiatan Persentase klien Anak yang terpenuhi hak pendidikannya mencapai 283%

❖ **Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker**

1. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelapora yang akuntabel tepat waktu

Kegiatan ini meliputi kegiatan perencanaan & penganggaran, pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban laporan keuangan. Selama tahun 2022, kegiatan dilaksanakan dengan baik dan sesuai target yang ditetapkan, mencapai 100%.

2. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan

Kegiatan telah dilaksanakan oleh Urusan Umum dalam pengelolaan urusan perlengkapan dan barang milik negara serta pelaksanaan urusan umum di lingkungan Bapas Surabaya. Kegiatan tersebut meliputi rangkaian kegiatan antara lain pengelolaan urusan perencanaan, pengadaan dan analisis kebutuhan barang milik negara, pengelolaan urusan penatausahaan dan penghapusan barang milik negara, pengelolaan urusan perawatan barang milik negara dan rumah tangga. Kegiatan dilaksanakan dengan baik mencapai 100%

3. Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasarakatan

Kegiatan telah dilaksanakan oleh Urusan Kepegawaian dalam Pembinaan Fisik Mental dan Disiplin (FMD) Peningkatan kapasitas petugas PAS dengan kegiatan untuk menunjang Tugas dan Fungsi (TUSI) secara langsung telah dilaksanakan dengan baik. Kegiatan dilaksanakan dengan baik mencapai 100%

4. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu

Kegiatan Pelaksanakan Pengelolaan Keuangan telah dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku dalam hal pelaporan dan pembukuan oleh bendahara. Selain itu juga melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan instansi terkait Seperti KPPN dan Ditjen Perbendaharaan

5. Jumlah Layanan Perkantoran

Untuk menunjang tugas pokok dan fungsi Pemasarakatan dibutuhkan output dalam rangka pelaksanaan operasional perkantoran guna mendukung pencapaian kinerja, yang terdiri atas komponen sebagai berikut :

- Gaji dan Tunjangan
- Operasional dan Pemeliharaan Kantor

Kegiatan sudah dilaksanakan dengan baik selama tahun anggaran 2022 dengan Nilai SMART 91,93 / Skala 100

6. Jumlah kendaraan bermotor

Jumlah target unit pengadaan kendaraan bermotor dalam 1 tahun adalah 0 (NOL)

7. Jumlah perangkat pengolah data dan komunikasi

Jumlah target unit pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi dalam 1 tahun adalah 31 unit. Sementara untuk belanja modal, pada tahun 2022 Bapas Malang melakukan pengadaan 31 unit perangkat pengolah data dan komunikasi, berupa;

JENIS	URAIAN PENGADAAN	VOLUME
PERANGKAT PENGOLAH DATA DAN KOMUNIKASI	SCANNER	2
	LAPTOP	29
JUMLAH		31

8. Jumlah peralatan dan fasilitas perkantoran

Jumlah target unit pengadaan peralatan dan fasilitas perkantoran dalam 1 tahun adalah 55 unit. Sementara untuk belanja modal, pada tahun 2022 Bapas Malang melakukan pengadaan 55 unit perangkat pengolah data dan komunikasi, berupa;

JENIS	URAIAN PENGADAAN	VOLUME
PERALATAN FASILITAS PERKANTORAN	ALAT PEMADAM	6
	MEJA	19
	KURSI	19
	AC SPLIT	11
JUMLAH		55

9. Jumlah gedung/ bangunan

Jumlah target luasan M2 pembangunan/ renov gedung/bangunan dalam 1 tahun adalah 0 (NOL).

Dibandingkan dengan capaian kinerja Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut;

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Keterangan
1	Meningkatnya pada luar lembaga di wilayah sesuai standar pelayanan pembimbingan klien masyarakat dan pemenuhan hak pendidikan klien anak	Presentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan diluar lembaga	55%	67,86%	Meningkat
		Presentase menurunnya Anak yang mendapatkan putusan sidang penjara	63%	73,15%	Meningkat
		Persentase klien Anak yang terpenuhi hak pendidikannya	40%	85,90%	Meningkat
2	Meningkatnya dukungan layanan manajemen Satker	Tersusunnya dokumen rencana kerja anggaran UPT Masyarakat dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	Terseleggara dengan baik
		Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan kerumah tanggaan	1 Layanan	1 Layanan	Terseleggara dengan baik
		Terpenuhnya data dan peningkatan kompetensi pegawai masyarakat	1 Layanan	1 Layanan	Terseleggara dengan baik
		Tersusunnya dokumen pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	Terseleggara dengan baik
		Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	Terseleggara dengan baik
		Jumlah Kendaraan Bermotor	21 Unit	21 Unit	Terseleggara dengan baik
		Jumlah perangkat pengolah data dan komunikasi	31 Unit	31 Unit	Terseleggara dengan baik
		Jumlah peralatan dan fasilitas perkantoran	55 Unit	55 Unit	Terseleggara dengan baik
		Jumlah Gedung atau bangunan	1 Unit	1 Unit	Terseleggara dengan baik

Secara umum capaian indikator pada sasaran “Meningkatnya pelayanan pembimbingan klien masyarakat dan pemenuhan hak pendidikan klien anak pada luar lembaga di wilayah sesuai standar” telah tercapai melebihi target. Untuk indikator kinerja “Persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga” telah tercapai 67,86%. Capaian ini melebihi target Tahun 2021 yang telah ditetapkan, yaitu 55%. Sehingga, bila dihitung tingkat capaian kinerjanya terhadap target Bapas Malang Tahun 2022, yaitu sebesar 135%. Untuk indikator kinerja “Persentase menurunnya Anak yang mendapatkan putusan pidana penjara” telah tercapai 73,15%. Capaian ini melebihi target Tahun 2021 yang telah ditetapkan, yaitu 63%. Sehingga, bila dihitung tingkat capaian kinerjanya terhadap target Bapas Malang Tahun 2022, yaitu sebesar 121%. Sementara untuk indikator kinerja “Persentase klien Anak yang terpenuhi hak pendidikannya” telah tercapai 85,9%. Capaian ini melebihi target Tahun 2021 yang telah

ditetapkan, yaitu 40%. Sehingga, bila dihitung tingkat capaian kerjanya terhadap target Bapas Surabaya Tahun 2022, yaitu sebesar 283%.

Sementara untuk capaian indikator pada sasaran “Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker” telah tercapai mencapai target. Semua indikator kinerja, yang meliputi; Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu, Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan, Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasarakatan dan Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu telah terselenggara dengan baik, serta untuk pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi serta peralatan dan fasilitas perkantoran telah terlaksana dengan baik sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Penyebab tercapainya target indikator kinerja pada Tahun 2022 ini dikarenakan terealisasinya kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja kegiatan di atas, antara lain :

- a) Scalling Up kerjasama dengan Kelompok Masyarakat Peduli Pemasarakatan (POKMAS LIPAS), baik pada kegiatan pendidikan, wirausaha atau hukum pada wilayah kerja Bapas Malang.
- b) Berkoordinasi dan bersinergi dengan Aparat Penegak Hukum di wilayah kerja Bapas Malang demi mendapat putusan terbaik bagi klien anak Bapas Surabaya.

Selain itu, pencapaian target kegiatan di atas juga karena didukung oleh sumber daya manusia yang selalu berusaha meningkatkan kompetensi yang dibutuhkan, khususnya pada bidang Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan dan Asisten Pembimbing Kemasyarakatan. Sementara, untuk jabatan pelaksana yang sangat kurang personil, rangkap pekerjaan pada satu jabatan menjadi solusi yang dilaksanakan oleh Bapas Malang, sambil terus mengajukan tambahan kebutuhan pegawai pada pusat.

3.2. REALISASI ANGGARAN

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bapas Malang pada tahun anggaran 2022, di dukung dengan Anggaran Perubahan sebesar Rp.5.735.549.000,- dengan rincian sebagai berikut:

NO.	SASARAN KEGIATAN	KEGIATAN	ANGGARAN 2022	PENYERAPAN ANGGARAN 2022	PERSENTASE PENYERAPAN ANGGARAN 2022	PERSENTASE PENYERAPAN ANGGARAN 2021
1	Meningkatnya pelayanan pembimbingan klien pemasarakatan di wilayah sesuai standar	Layanan Pembimbingan Klien Pemasarakatan	1.178.431.000	955.815.740	81,11%	100%

2	Terselenggaranya Dukungan Layanan Manajemen	Layanan Dukungan Manajemen Satker	4.557.118.000	4.554.925.868	99,95%	90%
JUMLAH ANGGARAN			5.735.549.000	5.510.741.608	96%	100%

Realisasi anggaran pada tahun 2022 tersebut diatas hampir memenuhi target anggaran yang telah ditetapkan. Dapat dikatakan kinerja Bapas Malang adalah sudah BAIK.

Adapun realisasi anggaran berdasar output kegiatan, adalah sebagai berikut;

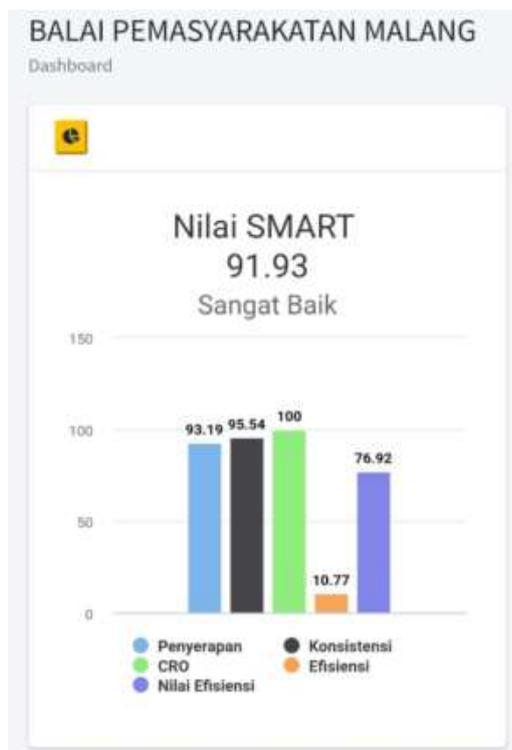
PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT, SUB OUTPUT, KOMPONEN, AKUN		PAGU REVISI	TOTAL REALISASI
1		3	5
BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	1.171.481.000	955.815.740
BF.5252	Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah		-
BAH	Pelayanan Publik Lainnya	1.200.000	600.000
BAH.	Tim Pengamat Pemasyarakatan		-
BDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat		-
BDC.	Bimbingan Kemasyarakatan	76.800.000	76.792.740
BDC.	Pelaksanaan Kegiatan Pasca-Rehabilitasi	7.550.000	6.623.000
BDC.	Pendampingan Peradilan Anak	207.716.000	120.700.000
BDC.	Pembimbingan dan Pengawasan	396.810.000	353.450.000
BDC.	Rekomendasi Program Pembinaan dan Pelayanan	481.405.000	397.650.000
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	4.605.378.000	4.426.927.912
EBA.956	Layanan BMN	9.900.000	6.300.000
EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat	12.060.000	-
EBA.962	Layanan Umum	42.400.000	30.452.000
EBA.994	Layanan Perkantoran	4.541.018.000	4.390.175.912
EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	100.000.000	99.819.690
EBB.951	Layanan Sarana Internal	100.000.000	99.819.690
EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	16.500.000	16.403.266
EBC.954	Layanan Manajemen SDM	16.500.000	16.403.266
EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	53.440.000	11.775.000
EBD.	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	8.400.000	3.600.000
EBD.	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	7.940.000	1.800.000
EBD.	Layanan Manajemen Keuangan	10.200.000	2.400.000
EBD.	Layanan Reformasi Kinerja	26.900.000	3.975.000

3.3. CAPAIAN KINERJA ANGGARAN

Integrasi data dan pengembangan sistem informasi yang berupa pertukaran data (data interchange) antara Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Aplikasi OM-SPAN dengan Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) pada Aplikasi SMART Tahun 2022 telah mencapai target yang ditetapkan yakni ; nilai SMART 91,93 dan nilai IKPA 96,42 yang ditunjukkan melalui aplikasi sebagai berikut :

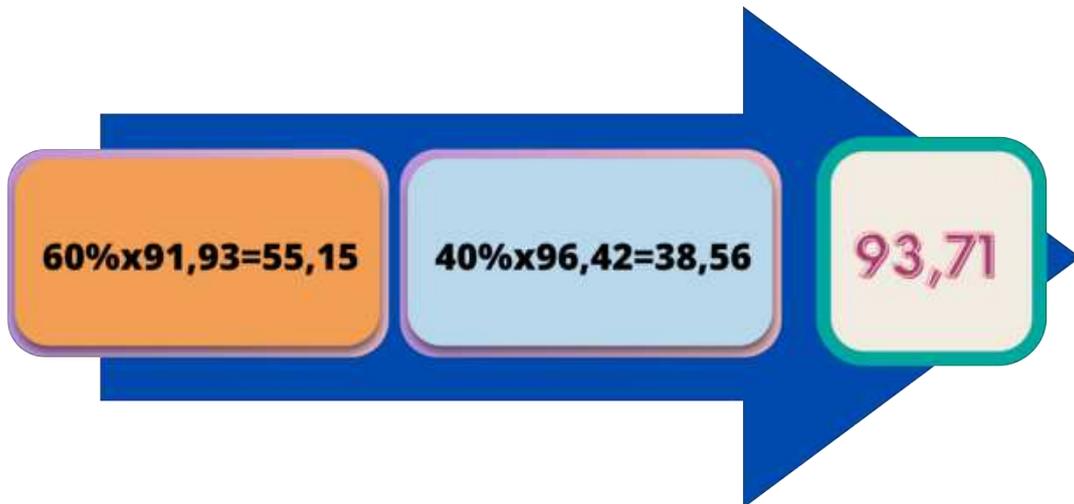
NO	KODE RFFN	KODE SA	KODE SAKPER	URAIAN SAKPER	KETERANGAN	KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN		KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN					KUALITAS HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN	NILAI TOTAL	KONTRIBUSI	NILAI AKHIR (NILAI TOTAL/KONTRIBUSI DOKOR)
						REVISI DIPA	DIRINDA PELAKSANAAN DIPA	PENYERAPAN ANGGARAN	REALISASI KONTRAKTUAL	PENYELERAPAN TAGIHAN	PENGLOLAAN LP DAN TUP	DISPENSASI SPM				
1	002	013	405327	BALAI PEMASYARAKATAN MALANG	Nilai	100,00	71,30	97,28	100,00	100,00	98,95	100,00	100,00	96,42	100%	96,42
					Ridit	10	10	20	10	10	10	5	25			
					Nilai Akhir	10,00	7,13	19,40	10,00	10,00	8,84	5,00	23,00			
					Nilai Aspek	95,65				93,13			100,00			

Screenshot nilai IKPA



Screenshot nilai SMART

Adapun pengukuran realisasi kinerja anggaran didasarkan pada 60% nilai SMART dan 40% nilai IKPA, sehingga nilainya adalah sebagai berikut;



Sehingga didapatkan nilai 93,71 yang dapat dikategorikan BAIK SEKALI.

3.4. CAPAIAN KINERJA LAINNYA

- Pada periode Triwulan III Tahun 2022, Bapas Malang mendapatkan Piagam Penghargaan sebagai Juara II Satker Berkinerja Terbaik atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) kategori Kepatuhan dan Ketepatan LPJ Bendahara dan Rekonsiliasi (periode Triwulan III TA 2022)



- Dalam rangka mengetahui hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan dan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik, Bapas Kelas I Malang melaksanakan survey IKM secara berkala (setiap bulan) melalui pengumpulan dan pengolahan dari Survey Balitbangham pada Satker Kemenkumham Tahun 2022. Laporan

rekapitulasi hasil survey Indkes Kepuasan Masyarakat pada tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut;

Kode Unit/ Satker	Unit/ Satuan Kerja	Provinsi	Usulan	Persyaratan Nilai Usulan	Komponen Layanan	Indeks	Nilai Indeks	Nilai Indeks	Nilai	Predikat Nilai	Nilai Mutu	Responden
013050600405327000	Balai Pemasayarakatan MALANG	Jawa Timur	WBK	Memenuhi Syarat	I. KUALITAS PELAYANAN	BOM	17.50	4	100	Sangat Baik	A	12
013050600405327000	Balai Pemasayarakatan MALANG	Jawa Timur	WBK	Memenuhi Syarat	II. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN	IPK	17.50	4	100	Sangat Baik	A	12



Sumber : Survey Balitbangham Pada Satker Bapas Malang Kemenkumham Tahun 2022

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Sebagai salah satu perwujudan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan kegiatan dan anggarannya, Balai Pemasarakatan Kelas I Malang telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tahun 2022. LKIP tahun 2022 menyajikan informasi mengenai capaian kinerja seluruh rangkaian program dan kegiatan Balai Pemasarakatan Kelas I Malang, baik dari aspek finansial maupun non-finansial, selama semester I tahun 2022 secara komprehensif sebagai wujud pertanggungjawaban publik (*public accountability*).

LKIP ini disusun berdasarkan dokumen Perencanaan Kinerja dan dokumen Perjanjian Kinerja Balai Pemasarakatan Kelas I Malang tahun 2022 yang mengacu sepenuhnya pada Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun 2015-2019. Bab III menunjukkan, secara umum pelaksanaan program dan kegiatan pada Balai Pemasarakatan Kelas I Malang telah dilaksanakan dengan baik sesuai peraturan perundang-undangan serta Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran TA. 2022. Secara umum isu strategis dan kondisi yang dihadapi Balai Pemasarakatan Kelas I Malang, adalah sebagai berikut:

1. Terbatasnya ruangan mediasi ABH dan ruangan bimbingan keterampilan.
2. Terbatasnya sarana transportasi kendaraan roda 4 (empat), saat ini hanya terdapat 1 unit, kurang sebanding dengan luas wilayah cakupan pelayanan Bapas, terbatasnya sarana Komputer.
3. Kurangnya jumlah pegawai Bapas, dengan spesifikasi kebutuhan (Operator Komputer, Tenaga Administrasi, Psikolog, Pembimbing Agama, Pelatih Keterampilan, Pelaksana Daktiliscopy).
4. Kurangnya sarana untuk bimbingan kerja Klien.

Pelaksanaan program kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana kinerja akan ditindaklanjuti pada semester berikutnya, dengan komitmen yang lebih baik dalam pelaksanaan rencana kerja yang telah ditetapkan.

4.2 Saran

Peningkatan capaian kinerja dan upaya pemecahan masalah atas kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan merupakan prioritas utama bagi Balai Pemasarakatan Kelas I Malang. Merujuk pada kendala dan isu strategis yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, berikut merupakan langkah-langkah yang perlu diambil oleh Balai Pemasarakatan Kelas I Malang:

1. Dalam rangka memperkuat pelaksanaan tuis yang diemban oleh Balai Pemasarakatan Kelas I Malang, perlu kiranya memperkuat koordinasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur, sehingga dapat lebih efektif dan terarah dalam merumuskan perencanaan program dan kegiatan, terutama terkait pada pedoman pelaksanaan tuis.

2. Peningkatan koordinasi diantara seluruh pegawai dan pejabat di lingkungan Balai Pemasarakatan Kelas I Malang serta melakukan koordinasi yang intensif dengan unit-unit kerja yang berada dalam lingkungan Balai Pemasarakatan Kelas I Malang dan *stakeholder* lainnya, instansi pemerintah maupun pihak-pihak terkait lainnya dalam pelaksanaan kegiatan.
3. melakukan upaya pemberdayaan dan pengelolaan SDM secara efektif yaitu dengan menata pengorganisasian dan penempatan pegawai secara tepat sesuai kebutuhan; dan mengembangkan sistem teknologi informasi untuk menunjang pelaksanaan tugas Balai Pemasarakatan Kelas I Malang agar terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Balai Pemasarakatan Kelas I Malang Tahun 2022 ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja, baik dalam bentuk teknis maupun administratif. Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Balai Pemasarakatan Kelas I Malang, sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan dan kebijakan di dalam melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM.

Sangat disadari bahwa Laporan Kinerja ini belum secara sempurna menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan, namun setidaknya pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang hasil Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Balai Pemasarakatan Kelas I Malang. Di masa mendatang, Balai Pemasarakatan Kelas I Malang akan melakukan berbagai langkah untuk lebih menyempurnakan Laporan Kinerja ini agar terwujud transparansi dan akuntabilitas yang ingin kita wujudkan bersama. Kiranya Laporan Balai Pemasarakatan Kelas I Malang Tahun 2022 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan dan kebijakan di dalam melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM.



Kepala



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Sugandi

NIP. 19650305 199003 1001

Tembusan :

1. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI
2. Para Pimpinan Unit Esselon I Kementerian Hukum dan HAM RI
3. Biro Perencanaan Kementerian Hukum dan HAM RI

DAFTAR LAMPIRAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I MALANG
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TIMUR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SUGANDI, Bc.IP, S.H. M.H.
Jabatan : Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas I Malang

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : WISNU NUGROHO DEWANTO S.E., M.H.
Jabatan : Pjt. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Surabaya, 4 Januari 2022

Pihak Kedua,
Pjt. Kepala Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan HAM Jawa Timur



WISNU NUGROHO DEWANTO S.E., M.H.
NIP. 19680521 199903 1 001

Pihak Pertama,
Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas I
Malang



SUGANDI, Bc.P, S.H. M.H.
NIP. 19660305 199003 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I MALANG DENGAN KEPALA KANTOR
WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TIMUR**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	Persentase klien Masyarakat yg produktif, mandiri dan berdayaguna	45%
2.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik, Bidang Hukum,	77,5

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Masyarakat yang Berkualitas	1. Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat 2. Indeks Pelaksanaan Kerjasama Masyarakat 3. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan IT Masyarakat	80 80 80

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya pelayanan bimbingan klien masyarakat dan pemenuhan hak pendidikan klien anak pada luar lembaga di wilayah sesuai standar	1. Persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga 2. Persentase menurunnya Anak yang mendapatkan putusan pidana penjara 3. Persentase klien Anak yang terpenuhi hak pendidikannya	50% 60% 30%
2.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	1. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Masyarakat dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu 2. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan 3. Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai masyarakat 4. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan

No. (1)	Sasaran Kegiatan (2)	Indikator Kinerja Kegiatan (3)	Target (4)
		5. Jumlah layanan perkantoran	1 layanan
		6. Jumlah kendaraan bermotor	21 unit
		7. Jumlah perangkat pengolah data dan komunikasi	31 unit
		8. Jumlah peralatan dan fasilitas perkantoran	55 unit
		9. Jumlah gedung/ bangunan	1 unit

Kegiatan	Anggaran
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp. 1.178.431.000,-
Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	Rp. 1.178.431.000,-
Program Dukungan Manajemen	Rp. 4.557.118.000,-
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasyarakatan	Rp. 4.557.118.000,-

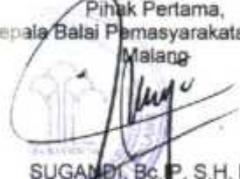
Surabaya, 4 Januari 2022

Pihak Kedua,
Ptt. Kepala Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan HAM Jawa Timur



WISNU NUGROHO DEWANTO S.E., M.H.
NIP. 19680521 199903 1 001

Pihak Pertama,
Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas I
Malang



SUGANDI, Bc. P., S.H. M.H.
NIP. 19650305 199003 1 001



**Dirjenpas Resmikan
Griya Abhipraya Pujon
Bapas Kelas I Malang**



**Pokmas Lipas dan Stakeholder
Bapas Malang Berikan Penyuluhan
Mengenai Hukum dan Sosial**



**Sinergitas Bersama APH,
Bapas Malang Dukung
Pemanfaatan E-Berpadu**



**Pelatihan Las Jadi Pilihan
Kegiatan Bimbingan Kemandirian
Klien Bapas Malang**